

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah diuraikan telah ditemukan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak Pencipta lagu dan musik tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, ini bisa terlihat keberhasilan dan kekurangannya dengan menggunakan teori George Edward III dalam Winarno (2018:177).

Berikut penjelasan mengenai keberhasilan dan kekurangan implementasi dengan teori George C. Edward III dalam Winanro (2018:177):

1. Komunikasi

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan melalui variabel komunikasi sudah berjalan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan *stakeholder* seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI) begitu juga dengan pencipta dan pengguna karya, tetapi terdapat kendala dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh DJKI dan WAMI yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasionalnya yang terbatas, karena hal itu yang menyebabkan sosialisasi kurang optimal dan tidak merata secara luas. Dari penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dalam variabel komunikasi belum maksimal.

2. Sumber Daya

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan melalui variabel sumber-sumber sudah dilaksanakan oleh DJKI, karena terdapat bagian-bagian yang mengatasi setiap kendala yang muncul, sedangkan untuk LMKN dan WAMI sebagai pemenuhan hak royalti. Tetapi terdapat kendala yang terjadi pada DJKI karena keterbatasan pegawai

untuk mensosialisasikan dan WAMI karena keterbatasan pegawai untuk mengawasi penggunaan lagu secara ilegal. Dari penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa keberhasilan kebijakan dalam variabel sumber-sumber belum maksimal.

3. Kecenderungan

Untuk mengukur keberhasilan implementasi melalui variabel disposisi dapat dijelaskan para pelaksana telah memahami tanggung jawab yang diberikan. Merupakan komitmen DJKI sebagai pembuat kebijakan untuk mengatasi dan menaggulangi permasalahan pada ruang lingkup hak cipta telah dilakukan dengan baik, begitu juga dengan LMKN dan WAMI yang berkomitmen untuk kepentingan pencipta dan pemilik hak atas hak royaltinya.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan melalui variabel struktur birokrasi dapat dijelaskan dalam pelaksanaan tugasnya sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing lembaga, untuk koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik dan pada konflik kepentingan ditangani dengan cara mediasi, hal itu menunjukkan bahwa ketiga lembaga menunjukkan integritas dalam penyelesaian konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bertentangan.

Mengenai keempat Indikator yang telah terlihat hasil penelitiannya ditemukan satu indikator yang paling baik implementasinya dan satu yang kurang baik implementasinya, pada indikator komunikasi seluruh upaya yang telah dilakukan oleh ketiga instansi sudah dijalankan dengan baik, untuk indikator Sumber Daya berjalan kurang baik yang disebabkan oleh kurangnya jumlah personil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI).

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan, maka dari itu didapatkan suatu saran sebagai berikut:

1. Diperlukan komunikasi mengenai edukasi hak cipta lagu dan musik secara masif yang dilakukan oleh ketiga lembaga yaitu DJKI, LMKN, dan WAMI.
2. Memanfaatkan media-media untuk penyampaian edukasi agar tersampaikan secara luas, selain memanfaatkan media sosial dan sosialisasi secara langsung ke masyarakat, juga adanya baliho dan papan iklan lainnya.
3. penambahan personil pegawai DJKI karena terdapat kekurangan di dua bidang yaitu pada bidang sosialisasi dan bidang perumusan kebijakan, untuk kedua bidang tersebut masing-masing diperlukan lima personil agar kelima ruang lingkup Hak Cipta (buku, pidato/ceramah, alat peraga, koreografi, lagu dan musik) bisa dipahami betul oleh personil dan dilaksanakan dengan optimal, begitu juga pada bidang sosialisasi.
4. Penambahan personil pegawai WAMI karena terkendala pada monitoring penggunaan karya. Diperlukan sepuluh personil agar pada saat melakukan pemantauan seluruh sektor usaha seperti karaoke, kafe, hotel dan segala jenis usaha lainnya bisa terpantau secara menyeluruh.
5. Perlunya pemberian penghargaan dalam bentuk kelompok atau individu sebagai motivasi para pegawai agar bisa bekerja dengan optimal.

